HARIAN analisa

Penerbit : PT. Media Warta Kencana
Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukiman
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : H. Soffyan
Wakil Pemimpin Redaksi : War Djamil
Managing Editor : Paulus M. Tjukrono
Redaktur : H. Agus Salim, Anthony Lantan, H. Hermansyah, SR. Hamonangan Panggabean, Idris Pasaribu, Hendar Tusmin, Kwa Tjen Siung, Saurma, H. Ali Murthado, Sugiatmo, Gunturadi Sukma, Tengku Kamarulzaman, Rizal Rudi Surya, Taufik Wal Hidayat, Zulmaidi, Muhammad Arifin, Zulkaedi, J.Anto.
Anggota Redaksi : Faisal Pardede, Irham Nasution, Ridwan, Fahrin Malau, M. Abduh, Ramadan Zakri Sagala, Rhinto Sustono, Amru Lubis, M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjuah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahrul Mukmin, Dina Nurhetty, Ilham Ridwan, Jaholong Sitanggang, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutajulu, Ismaini Khariima, Nirwanoyah Sukartara, Syafrin Tambunan, Yogi Yuwara, Adelina Savitri Lubis, Eko Satria Handoko, Indah Pratiwi, Sari Ramadhani, Irin Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha Putra, Rudi Saputra.
Fotografer : Fendy Nurgar, M. Said Harahap, Junaidi Gandy, Khairil Umri Batubara, Qodrat Al-Qadri.
Terbit : Seminggu 7 kali
Tarip Iklan : Rp. 13.000,- per mm/kolom (umum)
Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar duka cita)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326
Telepon : Redaksi : (061) 4156655 (5 saluran)
Fax. (061) 4151416.
Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436.
Perwakilan Jakarta : Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A Jakarta Pusat. Tlp. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax. : (021) 6322315
SIUPP : SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985
Dicetak Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR
Jl. Pulau Solor KIM II Mabar - Deliserdang

Tajuk Rencana

Sikapi UMP 2019

GUBERNUR Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubsu Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2018, telah menetapkan besaran UMP Sumut sebesar Rp2.303.403,43, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Penetapan UMP melalui SK Gubsu ini berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Sumut terdiri dari tiga unsur, pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh. Dalam rapat pembahasan, ketiga unsur menyepakati UMP Sumut 2019 senilai Rp 2.303.403,43, dengan dasar pertimbangan dan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B.240/Menaker/PHJSK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Inflasi 2,88 persen dan PDB Nasional 5,15 persen. Total kenaikannya 8,03 persen.

Setelah penetapan UMP 2019 ini, Dewan Pengupahan kabupaten dan kota diimbau untuk segera membahas dan merekomendasikan UMK ke Dewan Pengupahan Sumut. Selanjutnya akan diteruskan kepada gubernur agar mendapat persetujuan. Nantinya, rekomendasi UMK paling lama diumumkan 21 November 2018. (Jadwal ini tidak bersifat wajib, terlebih bagi daerah yang tidak memiliki Dewan Pengupahan. Bagi daerah yang tidak memberikan rekomendasi mengikuti UMK sesuai besaran UMP 2019.

Dalam pembahasan dan penetapan UMK 2019, bupati dan walikota di Sumut diminta menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk besaran kenaikan upah 8,03 persen sesuai Surat Edaran (SE) Menaker. Haltersebut dipertegas melalui SK penetapan UMP Sumut 2019 oleh gubernur. Akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak taat peraturan.

Surat Edaran Gubsu soal penyesuaian kenaikan UMK senilai besaran SE Menaker 8,03 persen, tertuang dengan No.561/10632/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Produk Pertumbuhan Domestik (PDB) 2018 serta Hasil Evaluasi Penetapan UMK 2018 dan Persiapan Penetapan UMK 2019. Bupati/wali kota wajib menaati semua ketentuan program strategis nasional yang tercantum di UU 23/2014 tentang Pemda. Ada sanksi berat jika tak menjalankan peraturan. Kenaikan UMP Sumut 2019 tersebut berkisar Rp 170 ribu dari UMP 2018 senilai Rp 2.132.168,68. Sesuai evaluasi UMK 2018 oleh pihak Disnaker Sumut dari 33 kabupaten/kota, terdapat 29 daerah yang menyampaikan rekomendasi UMK dan 4 daerah tidak mengajukan, yaitu Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat.

Tentu muncul pro dan kotra atas kenaikan UMP ini. Karena akan menimbulkan dampak baik bagi pengusaha mupun pekerja. Keharmonisan industrial pasti akan terganggu. Bagi pengusaha mau tidak mau atau mampu tidak mampu harus mematuhi peraturan pemerintah. Begitu juga pekerja, cukup tidak cukup harus tunduk dengan aturan yang telah diputuskan melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah, perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja. Sebagai hal pasti sudah dipertimbangkan. Keinginan perusahaan tentu ingin mensejahterakan pekerja, tetapi sesuai dengan kemampuan. Karena ayu penenatapan UMP ini sangat penting sebagai jaring pengaman bagi pengusaha maupun pekerja. Bagi perusahaan yang sudah mapan dan sejahtera tentu membayar upah karyawannya di atas UMP.

Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) mengaku kecewa dengan penetapan UMP 2019 sebesar Rp 2.303.403,43. Alasannya, penetapan UMP ini melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Layak Bagi Kaum Pekerja Buruh. Dalam UU itu, penetapan UMP harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hitungan organisasi ini setelah melakukan survei kebutuhan hidup layak di Sumut, upah buruh itu harusnya di angka Rp 2,9 juta.

DPW FSPMI Sumut berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera menarik kembali keputusan penetapan UMP Sumut 2019, dan melakukan revisi dengan mendengarkan aspirasi kaum buruh dan pekerja. Jika tetap memaksakan UMP tersebut, buruh berencana menempuh berbagai upaya agar aspirasinya didengar pemerintah. Salah satunya dengan melayangkan gugatan ke PTUN dan Mositi dak percaya kepada Gubernur Sumut. Gugatan UMP pernah terjadi untuk dua wilayah di Sumatera Utara dan pada akhirnya Pengadilan memenangkan gugatan buruh. Berharap penolakan UMP tahun 2019 jika memang ada sebaiknya diselesaikan dengan menempuh jalur hukum, dan tidak melakukan pengerahan massa dengan turun ke jalan. Sehingga suasana tetap kondusip dan industri berjalan normal.

Guit Seli

KPK tahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

- Lengkap sudah mulai dari ketua, wakil dan anggota.

ooOoo

SELURUH pesawat Boeing 737 Max 8 di Indonesia diperiksa secara khusus.

- Kenapa baru sekarang ya?

ooOoo

PEMERINTAH sepakati impor jagung pakan hingga 100 ribu ton.

- Semua pada impor.

ooOoo

GungGuit

Politisi (Memang Banyak yang) Sontoloyo

Oleh: T Agus Khaidir

Presiden Joko Widodo (Jokowi), entah memang ke lepasan omong, jengkel, lan satu pada tahun lalu pernah kesal pada hingar-bingar politik Tanah Air yang melesat-lesat tak karuan, melempar satu kata yang kedengaran menyentak: sontoloyo. Disebut 'kelepasan omong' karena Jokowi semestinya bisa menperhitungkan kata ini sungguh potensial menjadi bahan gorengan baru, dan sejauh ini, memang demikian.

Tengoklah ke media sosial. Kata 'sontoloyo', dengan berbagai perlakuan, justru digunakan untuk menyerang balik Jokowi. Ada yang menyebut tak pantas seorang kepala negara melontar kata ini di depan umum. Ada juga yang terkesan menakhumi, tetapi sesungguhnya tetap bernaksud menyerang –dengan olok-olok: Jokowi (barangkali) sedang stres dan tertekan.

Di laur media sosial hiruk pikuk tak kalah daisyat. Pihak-pihak berseberangan maupun yang satu kubu dengan Jokowi ramai-ramai buka suara. Saling berhadapan adu kuat *cocot*. Kata 'sontoloyo' mendadak jadi 'kata pencarian' (*key word*) populer di *Google*, saling sela-menyela dengan kata 'bendera'.

Sebegitu gawatkah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), 'sontoloyo' bernakna sama dengan 'konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian)'. Dari ketiga makna ini, makna mana yang lebih tepat dikaitkan dengan pernyataan presiden? Apakah 'konyol', apakah 'tidak beres', apakah 'bodoh', atau ketiganya sekaligus? Sebelum bergeser lebih jauh, disebabkan Jokowi orang Jawa, rasanya penting pula untuk menelaah makna kata 'sontoloyo' dalam bahasa Jawa, yang ternyata bisa dilihat dari dua sudut pandang, harfiah dan filosofis.

Secara harfiah, 'sontoloyo' merupakan kata sebutan untuk profesi, yakni penggembala itik atau bebek. Apakah ini 'sontoloyo' yang dimaksud Jokowi? Saya kira tidak. Saya kira, 'sontoloyo' yang dia maksudkan adalah sontoloyo dalam pengertian bahasa Indonesia, tetapi tidak sepemunya. Saya kira, dia juga hendak mendekatkannya dengan 'sontoloyo' dalam filosofi Jawa. Jadi tidak berhenti pada pengertian kulit luar. Bahwa hidup di dunia sekadar nunjir untuk minum. *Urip iku mung mampir ngombe*. Hidup yang sebentar harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang memiliki nilai guna. Bukan malah melakukan perbuatan konyol, tidak beres, dan bodoh. Sebab dengan begitu akan jadi *sontoloyo*.

Jika menang berangkat dari filosofi ini, maka boleh dikata, apa yang dikemukakan Jokowi sesungguhnya jauh lebih keras daripada yang diributkan. Jokowi bukan cuma menyebut politisi-politisi yang disasarnya sebagai orang-orang konyol, tidak beres, dan bodoh. Lebih jauh dia juga sedang mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang yang hidupnya di atas dunia telah berjalan dalam kesia-siaan. Betapa politik telah gagal menubuat hidup yang sebenarnya jauh lebih berkualitas. Sebaliknya, justru menjebak mereka hingga terkendalikan sepemunya oleh nafsu untuk mewujudkan keinginan-keinginan duniawi.

Politik hakekatnya lahir dari proses menyusun distribusi posisi dan kekuasaan untuk menyeinbangkan ketertiban dan anarki. Dalam proses ini terdapat ideologi dan moral. Tanpa keduanya, politik hanya satu gelanggang adu kuat dan adu cepat mengikuti kursi kekuasaan. Pengabdian dan loyalitas pada rakyat cuma lehicon. Demi kekuasaan kesungkanan ditepikan. Demi kekuasaan tak sungkan melakukan segenap daya upaya, termasuk bernuslihat kotor yang mengangkangi murani, akal sehat, dan kemanusiaan. Intrik, teror, tidak ada lagi ideologi. Pun sekiranya ada, ideologi tersebut tidaklah benar-benar mendarah daging sebab seluruh tindak tanduk mereka, aktivitas mereka, hanya dimotivasi oleh satu perkara: kursi jabatan. Maka kemenangan dalam pertarungan politik menjelma poin yang nalna penting. Kemenangan adalah segala-galanya. Kekalahan dipandang sebagai aib besar, penghinaan besar, dan karenanya nesti bisa dibalas, lantas membalikkannya jadi kemenangan.

Tentu saja identifikasi semacam ini akan banyak yang menyanggah. Jokowi sudah mengalaninya. Wajar, karena memang tidak ada yang berkenan disebut sontoloyo. Nannun kalau mau jujur-jujuran, siapapun pada dasarnya sama-sama paham betapa penyanggahan hanya akan jatuh jadi kenaifan yang menggelikan.

Belum percaya? Cobalah luangkan waktu Anda untuk mencari taim. Buka saja *Google*, lalu tenulkan nama politisi yang sudah berkali-kali periode menjadi wakil rakyat. Dapatkah Anda menemukan buah pikir mereka yang benul-benul bernanfaat bagi rakyat yang memilihnya?

Menyebut tidak ada sama sekali tentunya juga tak benar. Tentu ada buah-buah pikir mereka yang bernanfaat. Tentu ada politisi-politisi yang memilih mengabdi dan loyal pada rakyat. Hanya saja, apabila dilakukan penbandingan, persentase yang disebut terakhir sangat kecil. Mereka menjadi golongan minoritas.

Padahal kita sama-sama tahu pula, sebelum terpilih, sebelum duduk di kursi empuk di ruang-ruang rapat yang sejuk dan berbau harum, kemulukan-kemulukan yang ditawarkan para mayoritas sungguh tiada berbilang adulhainya. Mereka mengaku diri paling merakyat, paling nasionalis, dan yang paling celaka, paling moralis. Ironis, sebab atas pengingkaran terhadap produk-produk inagology ini, setahu saya, belum pernah ada yang meminta maaf.

John Simons, doktor di Leeds Trinity University, lewat *Ideology, Imagology, and Critical Thought: The Impoverishment of Politics*, artikel yang terbit di *Journal of Political Ideologies* tahun 2010, mendefenisikan imagology sebagai cara (atau gerakan?) untuk menciptakan atau menubenuk citra rasa dan perubahan opini –sikap, stereotip, dan prasangka– dengan menggunakan serangkaian representasi visual dan naratif.

Agar berhasil, pelaksanaan imagology nesti melibatkan setidaknya tiga pihak lain, yakni tim sukses (staf ahli, manajer kampanye, sanipai *spin doctor*), penyedia dan perancang visual (seniman/pelaku seni rupa, fotografer, animator, hingga desainer), serta agensi periklanan. Makin ke sini, imagology seperti inilah yang berkembang dan terus menguat. Muncul pertanyaan lain. Kenapa imagology mendapat tempat di panggung politik Indonesia?

Ini kasus menarik. Para penggeber imagology memanfaatkan anomali sikap rakyat (pada dasarnya bukan cuma di Indonesia) yang membenci narsistik, tetapi sekaligus, diam-diam maupun terang-terangan, kerap mengangankan dan mengidam-idamkan kesempurnaan: lelaki sempurna, perempuan sempurna, suami istri sempurna, penimpin sempurna, pahlawan sempurna. Di tingkatan akut, pengangangan dan pengidam-idaman ini tak lagi berhenti pada titik menerima yang tersedia. Mereka akan menciptakannya melalui upaya-upaya rekayasa yang di era sekarang, era media sosial, menang nakin mudah dilakukan.

Begitulah, kesontoloyoan di panggung politik bukan lagi temuan baru yang mengejutkan. Sebaliknya, merupakan kesahihan, rahasia umum yang sudah termaklumkan bahkan jauh sebelum Iwan Fals menciptakan dan menyanyikan lagu *Wakil Rakyat* yang masyhur itu. Jadi, tidak perlu pura-pura terkejut. ***

Penulis adalah Wartawan dan Fotografer

Keimanan Sosial

Oleh: Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

SETIDAKNYA, keimanan tidak hanya terukur dari nilai-nilai ke-akhiratan saja. Keimanan harus terimplementasi dalam ruang sosial. Menerjemahkan keimanan pada setiap sisi duniawi. Sehingga Iman dan Taqwa bersatu-padu membentuk gerak sosial yang beradab. Inilah cita-cita tinggi dari keberimanan (dalam konsep ini sering disebut Islam-Iman dan Ihsan). Salah satu realitas itu bisa kita lihat dari peran keimanan dalam menjaga alam dan lingkungan.

Islam tidak hanya mengatur ibadah yang *mahdhah*, Islam juga mengatur ibadah *ghairu mahdhah*. Islam peduli terhadap nilai-nilai sosial. Islam mengatur ritme kehidupan sosial unatanya melalui banyak aspek. Yang jelas, Islam tidak bergerak dalam ruang ritualitas saja, Islam juga mengatur hubungan *ma'amalah bil ma'rif* (hub sosial dengan jalan yang baik).

Dari pendekatan historis-sosiologis, banyak sejarah kehidupan Rasul dan para sahabat yang juga melibatkan aspek alam. Salah satunya dalam perjanjian perang, bahwa dalam peperangan tidak boleh ada yang merusak tanaman, pepohonan. Dari perspektif qurani, bahwa Alquran bukan hanya membincang hukum dan sosial. Dalam Alquran juga banyak ayat-ayat Kaunivyai yang di dalamnya membincang tentang alam dan alam.

Sebab itu, perhatian kita seharusnya beralih dari sesuatu yang *mahdhah* belaka dengan pendekatan ke-akhiratan, memuju pada aspek-aspek *ghairu mahdhah* yang lebih sosialis dan me-nasyarakat. Islam yang hidup di tengah-tengah kehidupan realistis masyarakat. Islam yang manusiawi, Islam yang membumi. Inilah yang harus menjadi analisis lebih jauh para pakar hukum Islam.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kepedulian kita terhadap alam. Hal ini berkaitan dengan realita yang saat ini terjadi, banjir, menumpuknya sampah pada tempat-tempat yang tak senestinya, membuang sampah sembarangan, pekarangan yang kotor dan tergenang, menjadi sederetan masalah yang real terjadi. Dan salah satu penyebab dasarnya adalah kedidak pedulian personal terhadap diri dan alam pribadi.

Setidaknya ada dua pendekatan yang bisa kita lihat untuk menumbuhkan kenaiman yang kuat peduli terhadap alam. Pertama, menggeser paradigma *ubudiyah*, dari sesuatu yang sakral –ukhrowi, menuju ibadah yang humanis-ukhrowi. Menggeser cara pandangan masyarakat untuk melihat ibadah hanya sesuatu yang ritualis dan pendekatannya ukhrowi belaka seperti sholat, puasa, i'tikah, zikir dan lain-lain menuju ibadah sebagai kehidupan fungsional interaksi masyarakat.

Dalam pendekatan sufistik, mengalihkan cara pandang unat untuk melihat ibadah dari ke-irfanian menuju ibadah akhlaki-amali yang irfani. Manupu merasakan nikmatnya berinan di ruang kehidupan sosial. Ketika berbuat baik, ketika menolong orang, ketika menbersihkan alam, ketika menjaga kehormatan diri dengan belajar, ketika peduli terhadap diri dengan beristirahat, mandi, makan dan lain-lain. Semua punya ruang keimanannya masing-masing. Sehingga apapun yang dilakukan dalam interaksi sosial kita, baik kepada diri pribadi, maupun interaksi sosial secara eksternal terhadap banyak orang dan banyak kehidupan.

Lebih jauh, melalirkan pemakaman dalam hati bahwa semua kebaikan yang dilakukan dalam hidup ini adalah ibadah, inilah yang nantinya akan menumbuh-besarkan makna dan ruang keimanan manusia. Lahirlah gerakan-gerakan yang humanis-religius. Sebab, semua kehidupan telah mengambil bagiannya masing-masing. Membersihkan parit rumah, menyapu halaman, menubuang sampah pada tempatnya, bukan lagi kegiatan sosial yang hanya ibadah –hanya hukum, tapi melaksanakannya bagian dari kebaikan yang luar biasa. Melaksanakannya, berarti menggabungkan kebaikan vertikal dan horizontal. Melaksanakannya berarti mengasinilasi ruang sadar-sosial untuk menjaga alam dengan sadar-ibadah. Mengupgradenya melalui niat. Memaknai bahwa semua yang dilakukan karena Allah Swt, dan ingin mendapatkan ridho Allah Swt.

Kedua, mengubah paradigma *mahdhah* menjadi *sunnah*. Dalam pendekatan sosiologis, manusia itu nakikhat fungsional. Semua interaksi sosialnya harus berfungsi langsung pada kebutuhannya. Mengapa manusia mau nasuk toilet, sebab ingin melaksanakan fungsinya, mandi dan lain-lain manusia sulit berhasil melaksanakan aktivitas yang "hanya fungsi". Selama manusia itu berakal, maka dia akan mencari ruang gerak fungsional dalam kehidupannya.

Pendekatan cara pandang inilah yang menjadi asunsi dasar mengapa manusia jarang menilih sesuatu yang *mahdhah* menjadi instrument hidupnya. Dalan pendekatan fungsional keislaman, pasti penelukmya akan cenderung melaksanakan ibadah dan kehidupan yang bernakna (melaksanakan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh). Sebab hitung-hitungannya jelas. Berpahala-berdosa. Inilah menjadi alasan banyak orang yang nulai meninggalkan rutinitas sosial sebagai ibadah, dan lebih memilih ritualitas *mahdhah* saja. Ruang sadar ini-lah yang harus dirubah.

Bagainana menggeser sesuatu yang *mahdh* (hanpa hukum) atau sering disebut boleh menjadi *sunat* (baik dilaksanakan). Caranya dengan merubah niat, merubah motivasi, merubah visi dengan memberikan akses luas terhadap kepentingan pribadi dan sosial. Gambaran sederhananya bisa kita dapatkan melalui makan. Seorang yang makan dengan membaca doa makan, dengan seseorang yang makan berdoa "ya Allah jadikanlah makan ku ini sebagai kekuatan bagiku agar aku tegar dan kuat bekerja untuk mengindupi anak istrika". Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. ***

Penulis Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Kashoggi dan Civilization Vandalism

Oleh: Jonson Rajagukguk

Terbunuhnya Jamal Kashoggi di Konsulat Arab Saudi merupakan sebuah wujud dari vandalisme peradaban. Dalam teori agama manapun yang berhak mencabut nyawa manusia hanyalah Tuhan. Salah satu dosa yang paling besar adalah mencabut nyawa manusia, apalagi itu dilakukan dengan terencana. Wajar saja jika pembunuhan berencana dalam pasal 140 KUHP kita selalu mendapat ancaman dan hukuman yang sangat berat. Apa yang terjadi dengan pembunuhan Jamal Kashoggi merupakan sebuah perencanaan tingkat tinggi dan tersusun dengan tidak rapi. Kasus pembunuhan Jamal Kashoggi dilakukan sangat tidak profesional dan terkesan amatiran (*impressed amateur*).

Sebagaimana yang kita ketahui, Jamal Kashoggi adalah seorang jurnalis yang sangat kritis dan menuntut adanya reformasi dan pembaharuan di negerinya. Bahkan sebelumnya Kashoggi adalah konsultan media kerajaan Arab Saudi, hanya saja karena sikap kritisnya Kashoggi diberhentikan oleh pihak kerajaan, dan kemudian menetap di Amerika Serikat. Apa yang terjadi dengan Jamal Kashoggi merupakan sebuah vandalisme peradaban (yang sangat kejam, keji dan merupakan sebuah perbuatan yang sangat anti dengan kritik dan anti demokrasi. Bahkan Presiden Amerika Serikat, dan berbagai negara-negara Eropa mengutuk siapa yang membunuh Kashoggi. Bahkan Presiden Turki racep erdogan dengan tegas mengatakan bahwa Arab Saudi harus melakukan ekstradisi terhadap 18 tersangka pembunuh Kashoggi.

Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari kasus Kashoggi ini? Jawaban yang pasti, kekurasan itu sangat anti dengan kritik. Padahal apa yang dilakukan Kashoggi melahui berbagai opininy mengenai reformasi negara Arab Saudi tidaklah membahayakan negara tersebut. Tujuannya sangat jelas, bagainana agar reformasi yang dilakukan putra mahkota bisa berjalan dengan baik demi nasa depan Arab Saudi yang lebih bermartabat. Padahal dalam pandangan putera mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) Arab Saudi sudah melakukan berbagai kenajuan bagainana supaya Arab Saudi yang modern pada tahun 2030 dapat terwujud dengan baik. Apa yang dilakukan oleh sang putera mahkota mendapat sambutan dari dalam dan juga dari luar, artinya Arab Saudi makin liberal dan modern.

Bahkan saat ini wanita Arab Saudi sudah diizinkan untuk menyetir dan menonton pertandingan sepak bola. Sebelumnya, wanita mendapat larangan dalam hal ini. Penubahan dari konservatif ke arah yang lebih baik tentu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, dari negara luar. Apa yang dilakukan oleh putera mahkota merupakan sebuah perwujudan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini bisa mengisolasi diri. Globalisasi karena perkenbangan teknologi internet, daya pikir makin kritis dan kemampuan penetrasi IT telah menubuat dunia ini ibarat sebuah desa (*global village*). Jarak tidak jadi halangan dalam komunikasi. Putera Mahkota Arab sangat menyadari ini, makanya visi Arab 2030 adalah sebuah upaya Arab menjawab globalisasi dan jaman millenial yang tidak terhindarkan lagi (*inevitable*).

Seperti apa globalisasi itu dan mengapa globalisasi ekonomi nan untur semua negara melakukan reformasi internal di negaranya agar bisa bertahan? Ada pendapat beberapa pakar mengenai globalisasi seperti yang dikemukakan oleh Martin Albrow, definisi globalisasi adalah semua proses yang berhubungan dengan penyatuan antara masyarakat (*all the peoples*) bersatu menjadi satu masyarakat dunia (*single world society*). Kemudian Malcom Waters dalan bukunya (*Globalization* dijelaskan bahwa definisi Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berdampak terhadap kurang pentingnya pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya, yang terwujud di dalam kesadaran setiap individu.

Senentara Anthony Giddens, mendefenisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial secara mendunia (*Globalization can thus be defined as the intensification of worldwide social relations*) sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya "*which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa.*"

(Bersambung ke hal. 24)

Surat Pembaca

SURAT PEMBACA *melayani keluhan-keluhan pembaca seputar layanan publik, tidak berunsur SARA. Kirimkan ke redaksi Analisa Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan, atau online@analisadaily.com, fax (061) 451-4031. Surat diketik antara setengah sampai satu folio hendaknya dilengkapi alamat, fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Redaksi berhak mengedit atau tidak memuat Surat Pembaca yang tidak memenuhi kriteria Analisa.* ***(redaksi)***

Mohon Tertibkan Bangunan di Atas Parit

WARGA Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia merasa keberatan atas pembangunan satu unit rumah tinggal dua lantai, atas nama Halimah, berlokasi Jalan Gatot Subroto Gg. Mantri No.32 F Medan Sei Sekambing C-II Lingkungan I, Kecamatan Medan Helvetia.

Warga merasa keberatan dan dirugikan atas pembangunan rumah permanen tersebut, sebab dibangun di atas parit atau selokan yang mengakibatkan air tidak lancar mengalir kelika hujan dan mengakibatkan banjir masuk ke rumah warga.

Sempat terjadi keributan antara pemilik rumah dan warga, pada 24 September 2018, pukul 09.00 WIB. mengharapkan bangunan yang dibangun

Pembangunan tersebut diketahui kepala lingkungan Lorong I Kelurahan Sei Sikambing C-II Kecamatan Medan Helvetia namun kepala lingkungan membiarkan.

Seharusnya kepala lingkungan dapat bertanggungjawab atas segala kegiatan warganya agar tidak terjadi perselisihan antara warga. Warga berharap kejadian ini segera ditangani oleh instansi terkait agar bangunan-bangunan liar atau yang tidak memiliki izin dapat segera diteribkan agar lingkungan tempat tinggal menjadi lebih teratur.

Besar harapan kami atas nama warga setempat yang telah menandatangani surat keberatan dan telah ditujukan pada isntansi terkait dapat menindaklanjuti keluhan kami. Terima kasih

FATIMAH HANUM
(Atas nama warga Jalan Gatot Subroto Gang Mantri Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia)